



APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



Scan untuk Unduh



Pelaksanaan **#UangKita** yang kredibel mendukung Indonesia Maju



“Pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga dan momentum pertumbuhan diperkirakan akan berlanjut. Pertumbuhan yang masih solid ini salah satunya ditopang oleh peran APBN yang bersifat countercyclical yang menjadi alat penggerak perekonomian”

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati



Penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.312,40 triliun atau 73,47 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 0,84 persen (yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp1.301,52 triliun.



Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp1.136,17 triliun atau 72,02 persen dari target APBN tahun 2019, sedikit turun 0,04 persen (yoy) dari tahun 2018 sebesar Rp1.136,66 triliun.

Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp176,23 triliun atau 84,39 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 6,90 persen (yoy) dari tahun 2018 sebesar Rp164,86 triliun.



Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.293,20 triliun atau 79,13 persen dari pagu APBN tahun 2019, meningkat 5,52 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.225,54 triliun.



PNBP mencatat realisasi sebesar Rp362,77 triliun atau 95,89 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 3,44 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp350,72 triliun.



TKDD mencapai Rp752,85 triliun atau 91,06 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh 4,99 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp717,07 triliun.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perekonomian global kedepan diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2019 yang ditandai dengan perbaikan kondisi pasar keuangan global melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter negara maju.

Namun, kondisi tersebut akan dipengaruhi oleh isu kelanjutan perundingan penyelesaian perang dagang AS-China akhir tahun ini. Peningkatan arus masuk modal terus berlanjut ke *emerging market*, dan mengakibatkan apresiasi nilai tukar negara *emerging market*, termasuk Indonesia. Tren penguatan nilai tukar dan perkembangan inflasi yang tetap terjaga dan diyakini berlanjut hingga akhir tahun akan lebih memperkuat stabilitas ekonomi. Hal ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, peningkatan ekspor melalui penguatan daya saing industri nasional akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja transaksi berjalan.

Respon negara maju terhadap kondisi ekonomi global melalui pelonggaran kebijakan moneter

meningkatkan prospek pasar keuangan global dan stabilitas ekonomi global. Perkembangan ekonomi ke depan akan bergantung pada hasil kesepakatan perundingan perang dagang Amerika-China yang akan dilakukan di pertengahan Desember 2019 ini. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga dan momentum pertumbuhan diperkirakan akan berlanjut. Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) November 2019 tercatat 124,2 menguat dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan optimisme konsumen yang didorong oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi ke depan.

Perkembangan inflasi di tingkat konsumen pada November 2019 tercatat sebesar 0,14 persen (mtm) menggambarkan inflasi tetap rendah dan terkendali. Dengan perkembangan inflasi tersebut, inflasi hingga November 2019 tercatat sebesar 2,37 persen (ytd) atau 3,0 persen (yoy). Perkembangan inflasi tersebut dipengaruhi oleh inflasi kelompok bahan makanan karena kenaikan harga komoditas bawang

merah, daging, dan telur ayam ras. Sementara itu, kelompok transportasi mengalami deflasi karena penurunan tarif angkutan udara. Komponen inflasi inti tercatat sebesar 3,08 persen (yoy) menurun dibandingkan November 2018 sebesar 3,2 persen (yoy) seiring redanya tekanan harga komoditas emas perhiasan karena tren penurunan harga emas global. Dengan realisasi inflasi kumulatif hingga November 2019 sebesar 2,37 persen (ytd), masih terdapat ruang gerak sebesar 1,13 persen untuk menjaga inflasi sesuai target 3,5 persen.

Tren nilai tukar Rupiah berada pada posisi yang semakin stabil dan cenderung menguat seiring dengan pelonggaran likuiditas keuangan global yang mendorong terjaganya aliran modal ke dalam negeri, termasuk Indonesia. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat per 12 Desember 2019 tercatat pada level Rp14.042,00. Dengan demikian, Rupiah mengalami apresiasi sebesar 2,91 persen (ytd) dibandingkan posisi awal tahun 2019. Kondisi nilai tukar yang stabil dan didukung oleh inflasi yang terkendali mendukung terjaganya momentum pertumbuhan. Kondisi ini juga didukung oleh kecukupan cadangan devisa. Hingga akhir November 2019, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang cukup tinggi, yakni sebesar USD126,6 miliar. Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 7,5 bulan impor atau 7,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Selanjutnya

untuk menjaga momentum pertumbuhan Bank Indonesia mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada level 5,0 persen.

Pembangunan sektor pariwisata yang dilaksanakan selama ini mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia terus mengalami peningkatan dan menopang penerimaan devisa dari sektor pariwisata. Hingga Oktober 2019, jumlah kunjungan wisman tercatat sebesar 13,62 juta kunjungan atau naik 2,85 persen (yoy) dibandingkan dengan Oktober 2018 yang berjumlah 13,25 juta kunjungan. Pemerintah menargetkan kedatangan wisman pada tahun 2019 sebesar 20 juta kunjungan atau naik sebesar 26,53 persen dari jumlah kunjungan tahun 2018 sebesar 15,8 juta, dengan target memasukan devisa sebesar USD17,6 miliar.

Dalam menghadapi tantangan ke depan, dengan pondasi ekonomi makro yang stabil beberapa prioritas kebijakan pembangunan perlu dilaksanakan. Prioritas penting yang perlu dilakukan Pemerintah adalah transformasi struktural dengan dukungan infrastruktur yang telah selesai dibangun untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Prioritas berikutnya adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dengan menjaga tingkat harga domestik dan nilai tukar pada tingkat yang stabil dan kompetitif. Kemudian,

Pemerintah juga terus meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan. Ke depan, pemerintah menekankan 5 prioritas yang akan dilaksanakan dalam pembangunan nasional, yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan pendidikan dan kesehatan, kelanjutan pembangunan infrastruktur, kemudahan regulasi investasi dan lapangan kerja, dan kelanjutan reformasi birokrasi.

Menjelang akhir tahun 2019 realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp1.677,11 triliun (77,46 persen dari target APBN 2019), atau turun 3,34 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Capaian realisasi pendapatan negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.312,40 triliun, PNBPNP sebesar Rp362,77 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,95 triliun atau masing-masing telah mencapai 73,47 persen, 95,89 persen, dan 447,24 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019. Berdasarkan pertumbuhannya, penerimaan perpajakan tumbuh negatif 3,27 persen (yoy), PNBPNP juga tumbuh negatif 1,11 persen (yoy), dan penerimaan hibah tumbuh negatif 83,16 persen (yoy).

Kinerja penerimaan pajak masih ditopang utamanya oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara sektoral, realisasi penerimaan pajak didorong oleh kinerja sektor usaha Pertambangan, Jasa Keuangan dan Asuransi,

Transportasi dan Pergudangan, dan Konstruksi dan Real Estate. Pertumbuhan komponen penerimaan pajak yang pertumbuhannya positif hanya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masih tumbuh 7,44 persen (yoy). Lebih detil, PPh Nonmigas ditopang oleh penerimaan PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Berdasarkan pertumbuhannya, penerimaan PPh Nonmigas didukung oleh PPh 21 dan PPh 25/29 Orang Pribadi (OP). Sementara itu, penerimaan PPN ditopang oleh PPN Dalam Negeri (DN) dan PPN Impor. Penerimaan kumulatif PPN/PPnBM tumbuh negatif 4,07 persen (yoy), meskipun lebih baik dibandingkan periode Januari-Oktober yang tumbuh negatif 4,24 persen (yoy). Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan volume impor Indonesia baik secara kumulatif maupun bulanan.

Kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai realisasi penerimaannya telah mencapai Rp176,23 triliun atau 84,39 persen dari target APBN 2019, serta mampu tumbuh positif sebesar 2,60 persen (yoy).

Pertumbuhan Kepabeanan dan Cukai utama berasal dari pertumbuhan cukai Hasil Tembakau (CHT) dan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Pertumbuhan tersebut didorong oleh efek tidak adanya kebijakan kenaikan tarif CHT di tahun 2019, efek pergeseran pelunasan pita cukai, dan adanya kenaikan tarif cukai MMEA. Lebih lanjut, komponen penerimaan Bea Masuk (BM) telah mencapai 86,35 persen dari target APBN 2019. Penerimaan BM secara kumulatif masih tumbuh negatif 5,04

persen (*yoy*), hal ini terjadi akibat melambatnya perekonomian global yang menyebabkan penurunan devisa bayar impor Indonesia, serta mulai mengecilnya selisih peningkatan kurs. Disisi lain komponen penerimaan Bea Keluar (BK), realisasinya telah mencapai 71,95 persen dari target APBN 2019. Untuk pertumbuhannya secara kumulatif, BK masih tumbuh negatif 48,48 persen (*yoy*), hal ini terjadi karena penurunan ekspor konsentrat tembaga sebagai penopang utama penerimaan BK, meskipun ekspor komoditas mineral lainnya yaitu nikel dan bauksit mengalami peningkatan.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Nopember 2019 mencapai Rp362,77 triliun atau sekitar 95,89 persen dari target APBN 2019. Capaian Realisasi PNBP ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,44 persen (*yoy*), dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018. Kenaikan ini disumbang dari pendapatan dari KND sebesar 70,19 persen (*yoy*), meskipun pertumbuhan negatif dialami oleh jenis-jenis PNBP lainnya (Penerimaan SDA). PNBP yang bersumber dari sumber daya alam relatif rentan terhadap fluktuasi harga komoditas (utamanya migas dan batubara). Dilihat dari komponennya, PNBP SDA hingga akhir Nopember 2019 mencapai Rp139,15 triliun atau 72,9 persen dari target APBN 2019, lebih rendah, dibandingkan capaian periode sama tahun 2018 yang mencapai Rp153,27 triliun (147,8 persen APBN 2018). Relatif lebih rendahnya capaian ini salah satunya

disebabkan penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan harga batubara (HBA) di tahun 2019. Rata-rata ICP periode Januari – Nopember 2019 sebesar US\$61,94/barrel, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun 2018 mencapai US\$68,62/barrel. Demikian juga dengan HBA yang pada periode Januari-Nopember 2019 mencapai US\$78,95/ton, lebih rendah dibanding 2018 yang mencapai US\$99,55/ton. Kinerja yang sama terjadi pada PNBP komponen Pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU). Dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 107,1 persen dari target APBN 2018 atau sekitar Rp46,37 triliun, capaian pendapatan BLU periode Januari-Nopember 2019 baru mencapai 87,7 persen dari target APBN 2019 atau sekitar Rp42,00 triliun.

Sebaliknya, **kinerja PNBP pada komponen PNBP dari pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan PNBP Lainnya membantu upaya tercapainya target PNBP 2019.** Peningkatan PNBP dari Pendapatan Kekayaan Negara dipisahkan (KND) yang mencapai Rp76,65 triliun atau sekitar 168,1 persen dari target APBN 2019, sangat membantu peningkatan untuk mencapai target PNBP keseluruhan. Peningkatan signifikan ini disumbangkan adanya penerimaan yang tidak dapat ditargetkan yaitu dari bagian Pemerintah atas surplus Bank Indonesia yang mencapai Rp30,09 triliun. Pendapatan KND di tahun 2018 sebesar Rp45,04 triliun atau 100,8 persen target APBN 2018, lebih rendah dibanding capaian tahun 2019. Selain itu, upaya mencapai target PNBP tahun 2019 juga disumbangkan

kinerja PNBP Lainnya yang mencapai lebih dari 100 persen dari target pada periode Januari-Nopember 2019. Capaian PNBP Lainnya periode Januari-Nopember 2019 sebesar Rp104,96 triliun atau 111,6 persen dari target APBN 2019. Pada periode yang sama tahun 2018 PNBP Lainnya mencapai Rp106,03 atau sekitar 126,6 persen dari target APBN 2018. Perkembangan harga komoditas yang belum menunjukkan besaran seperti pada tahun 2018 perlu diwaspadai, agar realisasi PNBP hingga akhir tahun 2019 dapat melebihi target APBN. *Trend* penurunan harga komoditas dapat berakibat prestasi capaian tahun 2019 tidak sebesar tahun 2018, meskipun target APBN diperkirakan masih dapat tercapai.

Realisasi Belanja Negara sampai akhir November 2019 mencapai Rp2.046,0 triliun (83,1 persen dari pagu APBN), meningkat 1,8 persen (*yoy*) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.293,2 triliun (79,1 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp752,8 triliun (91,1 persen dari pagu APBN). Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat bulan November 2019 tumbuh 1,8 persen (*yoy*) jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, utamanya dipengaruhi oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang sudah mencapai Rp105,7 triliun atau tumbuh sebesar 38,9 persen (*yoy*). Kenaikan ini menunjukkan komitmen nyata

pemerintah untuk senantiasa menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan dalam mencukupi kebutuhan hidup serta bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan di Indonesia.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir November 2019 mencapai Rp177,69 triliun atau 79,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi Rp123,58 triliun (77,2 persen dari APBN 2019) dan subsidi nonenergi Rp54,11 triliun (84,1 persen dari APBN 2019). Untuk subsidi energi, realisasi tersebut telah memperhitungkan pembayaran atas volume BBM dan LPG tabung 3 kg serta penjualan listrik yang disalurkan dari Januari hingga November 2019. Realisasi belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg mencapai Rp78,58 triliun atau 78,1 persen dari pagu APBN, dengan realisasi volume 91,67 persen dari kuota untuk jenis BBM dan 81,6 persen kuota untuk LPG tabung 3 kg. Sementara itu, realisasi belanja subsidi listrik mencapai Rp45,00 triliun atau 75,9 persen dari pagu APBN. Secara umum, persentase realisasi subsidi energi terhadap pagu anggaran 2019 dapat dikatakan lebih rendah dari target. Hal ini dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi ICP Januari-November (rata-rata US\$ 61,94/barel) dibandingkan dengan asumsi dalam APBN (US\$ 70/barel) dan apresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar selama periode Januari-November (rata-rata Januari-November Rp14.087/Dolar Amerika) dibandingkan dengan asumsi nilai tukar dalam APBN (Rp15.000/Dolar Amerika).

Lebih rendahnya realisasi dibandingkan pagu anggaran dalam APBN juga terjadi pada pos subsidi nonenergi. Hal ini utamanya terjadi pada *public service obligation* (PSO) dengan realisasi sebesar Rp2,89 triliun (42,8 persen dari APBN 2019) dan subsidi kredit program dengan realisasi sebesar Rp11,53 triliun (69,3 persen dari APBN 2019). Rendahnya persentase realisasi tersebut antara lain disebabkan oleh lambatnya penagihan dan proses verifikasi yang menjadi dasar pembayaran subsidi.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan November 2019 mencapai Rp752,85 triliun atau 91,06 persen dari pagu APBN 2019, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp689,21 triliun (91,07 persen) dan Dana Desa Rp63,63 triliun (90,90 persen). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp662,59 triliun (91,44 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp9,68 triliun (96,84 persen), dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp16,94 triliun (76,35 persen). Realisasi TKD sampai dengan November 2019 tersebut lebih tinggi Rp26,57 triliun atau sekitar 4,01 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2018. Tingginya realisasi TKD sampai dengan November 2019 tersebut terutama disebabkan karena: (1) meningkatnya realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 19,98 persen apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena penyaluran DID hingga tahap II yang meningkat di sebagian besar daerah penerima DID; (2) penyaluran DAK Nonfisik

lebih tinggi 6,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) serta peningkatan koordinasi secara kontinyu dengan K/L teknis terkait dalam mendorong penyerapan anggaran di daerah; serta (3) realisasi Dana Alokasi Umum yang meningkat 4,87 persen terutama disebabkan meningkatnya penyaluran DAU regular kepada Pemda serta telah disalurkan DAU Tambahan tahap I dan II kepada sebagian besar Pemda untuk bantuan pendanaan kelurahan. Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan November 2019 lebih tinggi Rp9,20 triliun (16,91 persen) dibandingkan realisasi Dana Desa pada periode yang sama tahun 2018. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penyaluran Dana Desa pada tahap I dan II serta upaya dalam mendorong daerah untuk segera memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana diatur dalam PMK No. 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Realisasi defisit APBN hingga akhir November 2019 mencapai Rp368,9 triliun. Realisasi defisit tersebut lebih tinggi daripada periode tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga November 2019 adalah sebesar Rp421,0 triliun yang

utamanya ditopang oleh realisasi pembiayaan utang Rp442,9 triliun. Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp465,1 triliun dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp22,2 triliun. Realisasi pinjaman (neto) yang negatif tersebut mengindikasikan kondisi lebih tingginya pembayaran cicilan pokok pinjaman dibandingkan dengan penarikan pinjaman yang dilakukan

Pemerintah. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk terus mendorong pengelolaan utang secara lebih *prudent* dan produktif antara lain dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan utang, serta memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif.

Realisasi APBN sampai dengan 30 November 2019

Realisasi APBN sampai dengan 30 November 2019 mencatatkan pendapatan negara mampu tumbuh 0,85 persen (yoy), mencapai Rp1.677,11 triliun atau 77,46 persen dari target APBN tahun 2019. Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.046,05 triliun atau 83,14 persen dari pagu APBN tahun 2019, meningkat 5,32 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rincian dari realisasi APBN 2019 sampai dengan 30 November 2019 tersebut antara lain:

1. Penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.312,40 triliun atau 73,47 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 0,84 persen (yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp1.301,52 triliun.

Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:

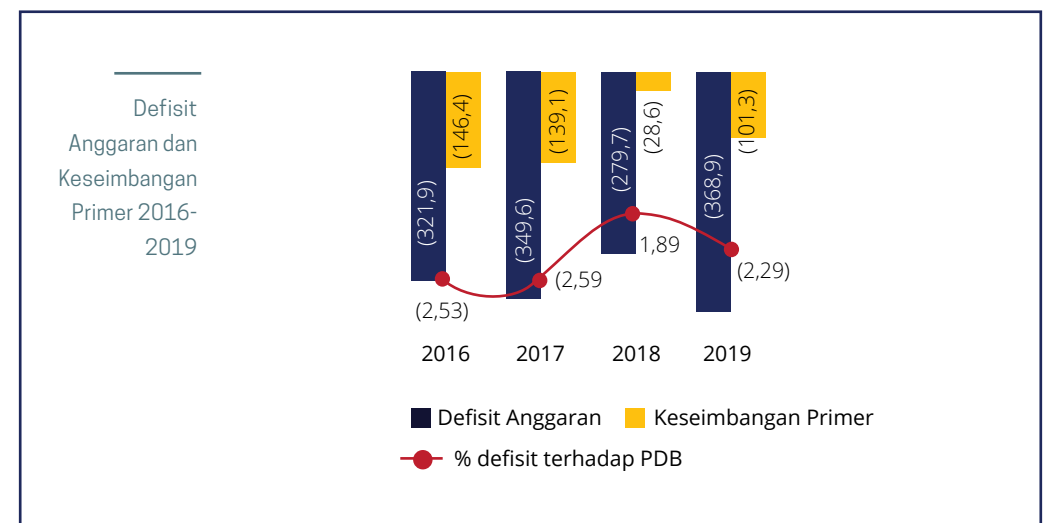
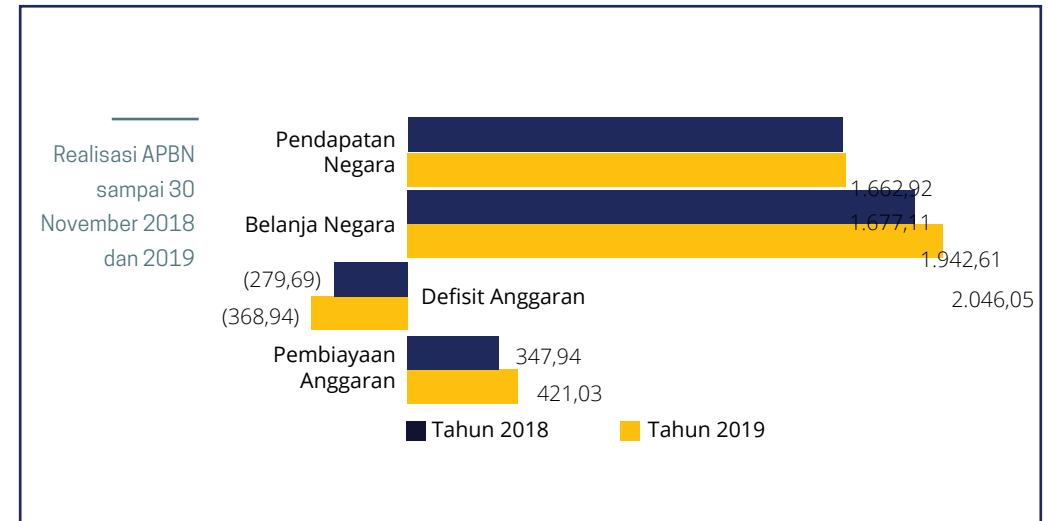
- Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp1.136,17 triliun atau 72,02 persen dari target APBN tahun 2019, sedikit turun 0,04 persen (yoy) dari tahun 2018 sebesar Rp1.136,66 triliun.
- Realisasi Penerimaan Kepabeaan dan Cukai mencapai Rp176,23 triliun atau 84,39 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 6,90 persen (yoy) dari tahun 2018 sebesar Rp164,86 triliun.

2. PNBPN mencatat realisasi sebesar Rp362,77 triliun atau 95,89 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 3,44 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp350,72 triliun.

3. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.293,20 triliun atau 79,13 persen dari pagu APBN tahun 2019, meningkat 5,52 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.225,54 triliun.

4. TKDD mencapai Rp752,85 triliun atau 91,06 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh 4,99 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp717,07 triliun.

Dengan capaian realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi defisit APBN tahun 2019 sampai dengan 30 November 2019 mencapai Rp368,9 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB, dengan keseimbangan primer mencapai negatif Rp101,31 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran periode sampai dengan 30 November 2019 sebesar Rp421,03 triliun, termasuk untuk pembiayaan investasi Rp22,40 triliun, terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp52,1 triliun.





DIPA 2020: Pedoman Pelaksanaan Anggaran untuk Menuju Indonesia Maju

Pewujudan dari kebijakan fiskal dalam APBN tahun 2020 memerlukan peran seluruh pemangku kepentingan dan seluruh jajaran pemerintahan yang menjadi penanggung jawab program-program pembangunan pada tahun anggaran 2020. Maka dari itu, setelah APBN 2020 diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 November 2019 menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) kepada Menteri/Pimpinan Lembaga serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Kepala Daerah. DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD inilah yang menjadi acuan bagi para Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah untuk melaksanakan anggaran atas berbagai program pembangunan pemerintah dalam APBN 2020 guna

mencapai target pembangunan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan. Hingga pada akhirnya, diharapkan pelaksanaan anggaran tersebut dapat mewujudkan tahapan Visi dan Misi Presiden/Wakil Presiden, yakni Indonesia Maju.

Penyerahan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD TA 2020 (dalam triliun Rupiah)

Belanja Negara pada tahun 2020 diarahkan untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan, terutama melalui penguatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan), penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, penguatan pertahanan dan keamanan, serta penguatan transfer ke daerah dan dana desa. Dari total Belanja Negara dalam APBN tahun 2020 yang mencapai Rp2.540,4 triliun, sebesar Rp909,6 triliun

Belanja Negara	2.540,4	
a.l. Belanja K/L	909,6	→ DIPA K/L
TKDD	856,9	→ Daftar Alokasi TKDD
▪ DAU	427,1	
▪ DBH	117,6	
▪ DTK	202,5	
▪ Dana Otsus & Keistimewaan DIY	15,0	
▪ Dana Desa	72,0	

akan dialokasikan melalui 87 K/L serta sebesar Rp856,9 triliun akan dialokasikan melalui TKDD.

Penyerahan DIPA K/L dengan total alokasi sebesar Rp909,6 triliun tersebut disampaikan langsung oleh Presiden secara simbolis kepada 12 Menteri/Pimpinan Lembaga yang dinilai dari prioritas belanja Pemerintah tahun 2020 serta kinerja pengelolaan keuangannya, antara lain di bidang pembangunan SDM (pendidikan dan kesehatan), infrastruktur, perlindungan sosial, serta pertahanan dan keamanan. DIPA K/L yang diserahkan tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2019. Maka, sejalan dengan perubahan nomenklatur beberapa K/L dalam Kabinet Indonesia Maju, akan dilakukan koordinasi lebih lanjut untuk perbaikan dan revisi DIPA beberapa K/L yang mengalami perubahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Daftar Alokasi TKDD dengan nilai total Rp856,9 triliun

diserahkan Presiden kepada para Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. TKDD di tahun 2020 ini diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif dalam rangka peningkatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok nusantara.

Arahan Presiden dalam Pelaksanaan Anggaran tahun 2020

Presiden secara khusus memberikan beberapa arahan kepada para Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah dalam pelaksanaan anggaran belanja negara yang tertuang dalam DIPA K/L maupun Daftar Alokasi TKDD tersebut kepada para Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah supaya belanja negara kita lebih berkualitas, yaitu:

- Belanja dimulai secepat-cepatnya. Artinya, realisasi belanja jangan sampai menumpuk di akhir tahun anggaran. Khususnya pada

belanja modal, seperti persoalan tahun ini dimana belanja modal hingga bulan November masih mempunyai sisa anggaran sampai puluhan triliun rupiah serta masih ada yang dalam proses lelang. Padahal, belanja modal berperan strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di saat kondisi ketidakpastian ekonomi global. Untuk itu, Presiden menekankan agar belanja harus mulai dieksekusi sejak bulan Januari atau awal tahun anggaran.

- Bukan hanya sent, tapi juga menjamin delivered. Dalam konteks ini, menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah harus memastikan bahwa alokasi belanja bukan hanya habis terbelanjakan, namun juga harus menghasilkan program yang berjalan baik, barang/layanan yang berkualitas, serta yang paling penting yaitu memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat. Hal ini mengingat upaya mengumpulkan penerimaan negara, seperti penerimaan pajak maupun bukan pajak (PNBP), bukanlah perkara yang mudah. Sehingga kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara harus diimbangi dengan kebijakan spending better, yakni belanja yang berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan oleh rakyat.
- Pelaksanaan anggaran merupakan kerja tim – bukan

kerja individu, kerja menteri/pimpinan lembaga, atau kerja gubernur/bupati/walikota. Presiden berpesan agar tidak ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah, dan sebagainya. Semuanya harus bekerja sama sebagai sebuah tim dalam rangka melaksanakan agenda-agenda besar negara serta mencapai tujuan nasional. Sebagaimana kerja sama antar kementerian dan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi super prioritas di Mandalika dan Labuan Bajo, antara lain: pembangunan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemanjangan runway bandara oleh Kementerian Perhubungan, pengurusan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah setempat, serta pengembangan acara dan produk wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Pariwisata setempat. Dengan semua pihak mendukung dan menuju satu tujuan yang sama, alhasil pekerjaan benar-benar selesai dan pada akhirnya mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah bahkan nasional serta mensejahterakan rakyat.

- Pembangunan SDM yang riil. Yang dimaksud dengan riil adalah hasil pembangunan SDM yang konkrit berupa peningkatan kualitas SDM. Selama bertahun-tahun, pembangunan SDM di Indonesia masih terfokus

pada peningkatan jumlah sertifikat training, namun tidak memperlihatkan adanya peningkatan yang signifikan pada skill dari SDM. Ke depan, anggaran pembangunan SDM yang mencapai puluhan triliun rupiah harus dipastikan mampu menghasilkan peningkatan skill sehingga mewujudkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Poin ini patut menjadi perhatian mengingat

pembangunan SDM merupakan prioritas nasional dan tema kebijakan fiskal tahun 2020.

Jadi, perlu ada perbaikan pola kerja dan mindset dalam pelaksanaan anggaran pada seluruh pemangku kepentingan dan seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah sesuai dengan arahan presiden tersebut dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



PENERIMAAN PAJAK

Sebagai kelanjutan turning point Penerimaan Pajak di bulan Oktober, sampai November telah tercapai penerimaan sebesar Rp1.136,17 triliun

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi
Penerimaan
Pajak s.d.
November
2019

Uraian	APBN 2019	Realisasi Januari - November 2019		
			Δ% 2018 - 2019	% thd Target
Pajak Penghasilan	894,45	668,61	2,64 %	74,75 %
- Non Migas	828,29	615,72	4,07 %	74,34 %
- Migas	66,15	52,89	-11,51 %	79,95 %
PPN & PPhBM	655,39	441,18	-4,07 %	67,32 %
Pajak Bumi dan Bangunan	19,10	20,40	8,91 %	106,78 %
Pajak Lainnya	8,61	5,97	-9,16 %	69,38 %
Jumlah	1.577,56	1.136,17	-0,04 %	72,02 %

Berdasarkan pencatatan Kas Negara, penerimaan pajak sampai dengan tanggal 30 November 2019 mencapai Rp1.136,17 triliun. Dengan demikian,

dari target APBN sebesar Rp1.577,56 triliun, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 72,02 persen. Penerimaan pajak sampai dengan bulan November menunjukkan

Pertumbuhan Penerimaan Pajak

pertumbuhan -0,04 persen (yoy). Namun demikian, perlu diingat juga bahwa untuk bulan November 2019 ini, tanggal 30 November 2019 jatuh pada hari libur. Implikasinya, terdapat pergeseran tanggal jatuh tempo pembayaran untuk setoran PPN masa Oktober. Setoran PPN masa Oktober seharusnya paling lambat disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 30 November, namun berdasarkan ketentuan, apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur nasional (termasuk hari-hari cuti bersama yang ditetapkan pemerintah), maka jatuh tempo pembayaran adalah hari kerja berikutnya setelah hari libur (kecuali pelaporan PPh Pasal 29). Akibatnya, terdapat sebagian setoran PPN yang seharusnya disetorkan pada tanggal 30 November menjadi disetorkan pada tanggal 2 Desember. Dengan memperhitungkan setoran-

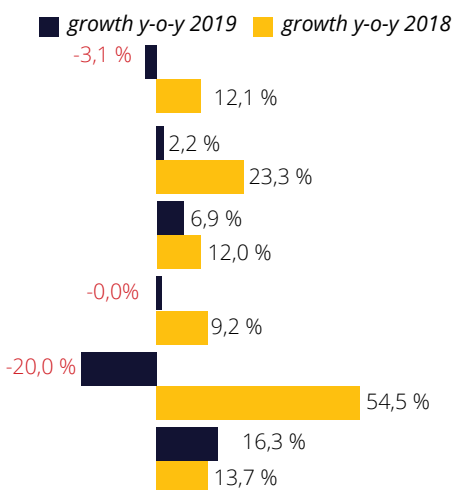
setoran tersebut, penerimaan pajak periode Januari – November 2019 sesungguhnya tumbuh 0,26 persen (yoy), atau meningkat dibandingkan bulan lalu, yakni 0,23 persen (yoy).

PPh Non Migas merupakan kontributor terbesar penerimaan pajak, dengan realisasi Rp 615,72 triliun, atau berkontribusi sebesar 54,19 persen terhadap total penerimaan pajak. Penerimaan PPh Non Migas sampai dengan November tahun ini tumbuh 4,07 persen (yoy), dan saat ini telah mencapai 74,34 persen dari target. PPh Pasal 21 menjadi penopang utama kinerja PPh Non Migas, dengan realisasi yang telah mencapai Rp 133,17 triliun. Pertumbuhan PPh Pasal 21 sampai dengan November sebesar 10,58 persen (yoy), meningkat dari 9,77 persen (yoy) sampai dengan bulan Oktober lalu. Setelah sempat

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi $\Delta\%$	
	Jan-Nov 2019	Jan-Nov 2018-2019
PPh Pasal 21	133,17	10,58 %
PPh Pasal 22	16,32	6,52 %
PPh Pasal 25/29	222,00	1,81 %
- Orang Pribadi	10,34	16,59 %
- Badan	211,66	1,18 %
PPh Final	107,45	6,73 %
PPN Dalam Negeri	271,51	-1,76 %
Pajak atas Impor	209,44	-6,06 %
- PPh 22 Impor	49,32	-1,47 %
- PPN Impor	155,75	-7,88 %
- PPnBM Impor	4,37	13,96 %

Industri Pengolahan	Rp 312,90 T	29,7 %
Perdagangan	Rp 219,34 T	20,8 %
Jasa Keuangan	Rp 151,20 T	14,3 %
Konstruksi & Real Estat	Rp 73,30 T	6,9 %
Pertambangan	Rp 52,49 T	5,0 %
Transportasi & Pergudangan	Rp 44,15 T	4,2 %



* penerimaan pajak sektoral non migas, non PBB, dan non PPh DTP

Penerimaan Pajak Sektoral

mengalami perlambatan di triwulan III dan tumbuh terbatas di bulan September, Pertumbuhan PPh Pasal 21 kembali meningkat di angka 10,42 persen dan 19,60 persen (yoy). Hal ini sejalan dengan pantauan Bank Indonesia, yang dalam rilis Survei Kegiatan Dunia Usaha menyebutkan “penggunaan tenaga kerja di triwulan III 2019 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya”, namun diprediksikan bahwa “pada triwulan IV 2019 tingkat penggunaan tenaga kerja diprakirakan meningkat secara terbatas”.

Mendekati akhir tahun 2019, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi merupakan jenis pajak yang mengalami pertumbuhan paling tinggi, tumbuh 16,59 persen (yoy). Pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sepanjang tahun 2019 stabil *double digits* sebagai efek terpeliharanya kepatuhan Wajib Pajak

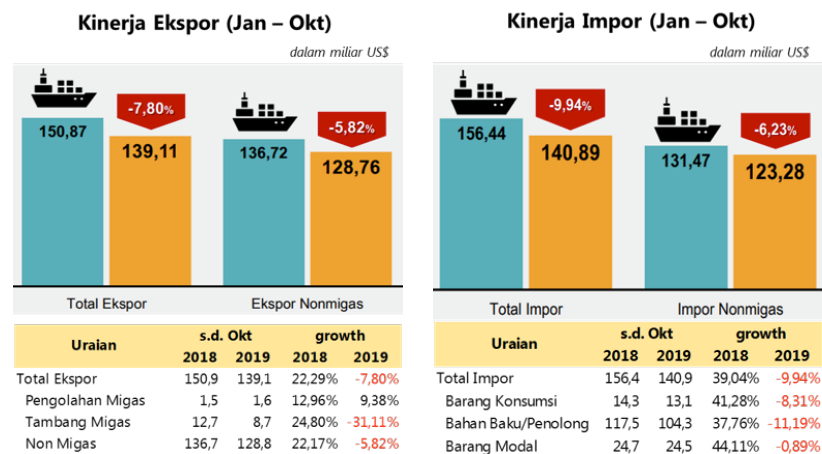
pasca *Tax Amnesty*. Kinerja PPh Pasal 22 dan PPh Final pun terus konsisten dengan pertumbuhan di atas 5 persen, masing-masing pada level 6,52 persen (yoy) untuk PPh Pasal 22 dan 6,73 persen (yoy) untuk PPh Final. Catatan menggembirakan ditorehkan oleh jenis pajak PBB, sebagai jenis pajak utama pertama yang mampu mencapai target di tahun ini, dengan capaian 106,78 persen dan pertumbuhan 8,91 persen (yoy). Perlu ditegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi memungut/ mengadministrasikan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) dan PBB yang dimaksud di sini adalah untuk sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3). PPh Pasal 25/29 Badan menunjukkan peningkatan kinerja, tumbuh

Kinerja Ekspor dan Impor Nasional

1,18 persen (yoy) setelah sempat mengalami kontraksi, terutama sepanjang triwulan III. Khusus untuk bulan November sendiri, PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh 25,22 persen (yoy) bila dibandingkan dengan November tahun lalu. Di sisi lain, PPN Dalam Negeri masih mengalami kontraksi, dengan pertumbuhan -1,76 persen (yoy). Kontraksi ini merupakan efek dari pemberian kemudahan restitusi dipercepat yang mengakibatkan peningkatan restitusi di awal tahun. Apabila efek program percepatan restitusi dikecualikan dari perhitungan, penerimaan bruto PPN Dalam Negeri masih mengalami pertumbuhan sebesar 4,60 persen (yoy). Selain itu, normalisasi pertumbuhan *baseline* PPN Dalam Negeri lebih banyak terjadi pada transaksi dengan pemungut Bendahara/BUMN/non-Bendahara.

Bahkan, pertumbuhan *baseline* PPN Dalam Negeri sektor Swasta masih cukup baik, di level 6,00 persen (yoy).

Sementara itu, pajak-pajak atas impor juga masih mengalami kontraksi, dengan pertumbuhan -6,06 persen (yoy). PPh Pasal 22 Impor tumbuh -1,47 persen (yoy) dan PPN Impor tumbuh -7,88 persen (yoy), walaupun PPnBM Impor justru mampu tumbuh 13,96 persen (yoy). Kontraksi pajak-pajak impor ini diakibatkan moderasi aktivitas impor. Nilai impor kumulatif Januari-Oktober 2019 adalah USD140.893,5 juta atau turun 9,94 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan kegiatan impor berdampak langsung terhadap output produksi karena sebagian besar impor adalah atas bahan baku dan barang modal. Akibatnya, penyerahan dalam



Sumber data: BPS (Berita Resmi Statistik 15 November 2019)

negeri dan ekspor juga mengalami kontraksi. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari – Oktober 2019 mencapai USD139,11 miliar atau menurun 7,80 persen dibanding periode yang sama tahun 2018

Imbas dari moderasi ekspor - impor terlihat pada sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, dan sektor Pertambangan. Ketiga sektor tersebut juga merupakan sektor usaha yang sangat merasakan tekanan peningkatan restitusi. Akibatnya, sektor Industri Pengolahan mengalami kontraksi dengan pertumbuhan -3,1 persen (yoy) sedangkan sektor Perdagangan mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 2,2 persen (yoy). Sebenarnya, pertumbuhan bruto non impor kedua sektor ini relatif baik, masing-masing sebesar 4,5 persen (yoy) untuk sektor Industri Pengolahan dan 8,1 persen (yoy) untuk sektor Perdagangan.

Untuk sektor pertambangan, selain moderasi ekspor – impor dan tekanan restitusi yang disebutkan di atas, moderasi harga-harga komoditas di pasar global juga menyebabkan pertumbuhan PPh Migas mengalami kontraksi dengan pertumbuhan -11,51% (yoy), dan penurunan harga komoditas energi di akhir tahun 2018 sebagai basis penghitungan PPh Badan di tahun 2019 memberikan tekanan pada penerimaan PPh Pasal 25/29 badan, sehingga sektor ini

terkontraksi dengan pertumbuhan -20,0 persen (yoy). Namun demikian, beberapa jenis pajak masih tumbuh relatif tinggi di sektor ini, seperti PPh Pasal 21 (tumbuh 12,6 persen (yoy)), PPh 22 Ekspor Minerba (9,4 persen (yoy)), dan PPh Pasal 23 Jasa (14,2 persen (yoy)) yang merupakan indikator positif aktivitas produksi di sektor Pertambangan.

Menjelang akhir tahun 2019, Pemerintah masih optimis dalam upaya menghimpun penerimaan pajak sebagaimana diamanatkan dalam APBN. Sektor transportasi dan pergudangan misalnya, mampu tumbuh *double digits* hingga 16,3 persen (yoy). Sektor jasa keuangan dan asuransi pun tumbuh 6,9 persen (yoy). Momen hari libur natal – tahun baru yang akan segera tiba diperkirakan akan menggenjot roda perekonomian pada akhir bulan Desember. Konsumsi masyarakat dan pengeluaran perusahaan untuk bonus/THR karyawan diperkirakan akan meningkat, yang selanjutnya mendorong kinerja penerimaan pajak dari sektor-sektor terkait seperti sektor perdagangan dan sektor transportasi. Demikian juga dengan penerimaan jenis pajak terkait seperti PPh Pasal 21, PPh Final, dan PPN Dalam Negeri juga diperkirakan mengalami peningkatan kinerja. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek positif untuk menutup penerimaan pajak di penghujung tahun 2019.

Pajak Bertutur: Strategi Amankan Penerimaan Pajak Masa Depan

Sebagai institusi yang diberi mandat untuk menghimpun penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya melakukan upaya-upaya untuk mengamankan penerimaan negara dalam jangka pendek saja. Menanamkan fondasi untuk penerimaan pajak jangka panjang juga tidak luput dari perhatian DJP.

Membangun masa depan perpajakan Indonesia harus diawali dengan membangun kesadaran pajak generasi muda, terutama para peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah. Merekalah yang nantinya akan menjadi pelaku ekonomi masa depan. Oleh karena itu, melalui program Inklusi Kesadaran Pajak, DJP tidak

henti-hentinya berupaya memberikan pemahaman kepada para peserta didik akan arti penting pajak bagi pembangunan bangsa.

Salah satu wujud program Inklusi Kesadaran Pajak adalah Pajak Bertutur. Konsep kegiatan ini sederhana, yaitu bertutur kepada para peserta didik mulai dari level Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi bahwa pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi kemajuan negara. DJP berharap kegiatan ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme peserta didik yang salah satunya diwujudkan dengan membayar pajak.

Pajak Bertutur tahun ini bertema "Guru, Baktimu Tiada Tara", diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional.



Kegiatan tahunan yang sudah ada sejak tahun 2017 ini dilaksanakan serempak pada tanggal 22 November 2019 oleh 352 KPP dan 206 KP2KP dan mampu menjangkau 57.766 siswa dari 804 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA/SMK. Selain itu, di tingkat regional, 34 Kanwil DJP mengadakan kegiatan untuk memberikan apresiasi kepada para pihak termasuk para pemangku kepentingan pendidikan yang telah berperan dalam upaya menumbuhkan kesadaran pajak.

Di tahun ketiga Pajak Bertutur ini, DJP juga bekerja sama dengan PGRI untuk mengadakan lomba Guru Bertutur Pajak (Gutupak) di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 592 unit kerja DJP. Tak tanggung-tanggung, pemenang lomba Gutupak ini mendapat penghargaan langsung dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada puncak acara peringatan hari ulang tahun ke-74 PGRI dan Hari Guru Nasional 2019 di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi.

Rangkaian acara Pajak Bertutur tahun 2019 berakhir pada puncak perayaan Pajak Bertutur yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 di

Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Acara ini berisi gathering dengan pemangku kepentingan pendidikan serta pemberian penghargaan kepada para pihak yang telah membantu dalam upaya menumbuhkan kesadaran pajak di lingkup nasional, meliputi Kementerian, Lembaga, Asosiasi, Profesional, dan Praktisi.

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengapresiasi respon positif para stakeholder terhadap program Inklusi Kesadaran Pajak. Suryo pun menekankan bahwa bela negara tidak harus dengan memanggul senjata, tapi dapat dilakukan dengan menyumbang untuk membeli senjata. Terakhir, Suryo menitikkan rasa kesadaran pajak para calon pembayar pajak kepada para guru dan dosen karena DJP tidak mungkin melakukan inklusi kesadaran pajak ini sendirian. Dukungan berkelanjutan dari para pemangku kepentingan pendidikan sangat diperlukan untuk menyiapkan generasi bangsa yang memiliki kesadaran membayar pajak yang lebih baik demi mengamankan penerimaan pajak di masa yang akan datang.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

KEPABEANAN DAN CUKAI

Kinerja Penerimaan dari Cukai terutama Cukai Hasil Tembakau Dorong Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Tumbuh Positif

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai s.d. 30 November 2019

No.	Jenis Penerimaan	APBN 2019	Realisasi		Δ%		% Capaian
			2018	2019	2018	2019	
1	BEA MASUK	38.90	35,37	33,59	13,11	-5,04	86,35
2	CUKAI	165.50	123,31	139,46	18,25	13,10	84,26
3	BEA KELUAR	4.42	6,18	3,18	76,24	-48,49	71,95
	TOTAL	208.82	164,86	176,23	18,55	6,90	84,39
	PPN Impor		169,07	155,75	26,55	-7,88	
	PPn BM Impor		3,83	4,37	8,60	13,96	
	PPH Pasal 22 Impor		50,05	49,32	27,28	-1,46	
	Total PDRI lainnya		222,95	209,44	26,358	-6,06	
	Total Bea Cukai dan Pajak		387,81	385,67	22,91	-0,55	

Realisasi atas penerimaan negara yang bersumber dari kepabeanaan dan cukai per akhir bulan November 2019 sudah dapat mencerminkan *performance* sepanjang tahun 2019. Kinerja ekspor dan impor sepanjang tahun 2019 melambat karena tahun 2019 merupakan tahun yang keras dan terjadi perpanjangan *gloomy* ekonomi tahun 2018.

Komponen penerimaan kepabeanaan

dan cukai, antara lain Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK), dan Cukai, sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Faktor eksternal dimaksud antara lain, kondisi geopolitik perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang mempengaruhi perekonomian global, dan diperkirakan masih menekan volume perdagangan serta fluktuasi harga komoditas di pasar internasional yang berimbas pada

perlambatan kinerja ekspor dan impor nasional.

Sedangkan faktor internal yang turut mempengaruhi adalah terbatasnya Barang Kena Cukai (BKC), kontraksi aktifitas ekspor dan impor, risiko menurunnya pasokan komoditas ekspor mineral tambang akibat kebijakan relokasi situs eksplorasi, peredaran BKC ilegal, dan tantangan untuk terus meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa.

Penerimaan kepabeanaan dan cukai per tanggal 30 November 2019 telah mencapai Rp176,23 triliun atau 84,39 persen dari target APBN Tahun 2019. Capaian tersebut masih meneruskan tren positif sejak awal tahun 2019, dengan tumbuh sebesar 6,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif penerimaan didorong penerimaan Cukai yang tumbuh signifikan sejak awal tahun.

Penerimaan cukai per 30 November 2019 adalah sebesar Rp139,46 triliun atau 84,26 persen dari targetnya. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh sebesar 13,10 persen dibandingkan bulan November 2018. Pertumbuhan pada penerimaan Cukai tersebut

merupakan pertumbuhan tertinggi bila dibandingkan komponen penerimaan yang lain. Faktor kebijakan pelunasan pita cukai dan program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) menjadi faktor pendorong penerimaan cukai tersebut.

Penerimaan Cukai HT mempunyai porsi terbesar dalam penerimaan Cukai, yang hingga 5 Desember 2019 telah mencapai sebesar Rp143,66 triliun dan tumbuh 13,69 persen. Pertumbuhan signifikan Cukai HT di tengah perlambatan penerimaan BM dan BK menjadi pendorong utama penerimaan kepabeanaan dan cukai. Kinerja tersebut akibat kebijakan relaksasi pelunasan pita cukai rokok kredit dan efektifitas program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dalam mengurangi peredaran rokok ilegal.

Penerimaan cukai MMEA sampai dengan akhir November 2019 telah mencapai Rp6,20 triliun atau tumbuh 15,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Tumbuhnya produksi MMEA dalam negeri sebagai akibat semakin kondusifnya daerah pasar utama, menjadi faktor positif penerimaan cukai MMEA. Sedangkan capaian cukai EA per 30 November 2019 telah mencapai Rp0,11 triliun atau 70 persen dari targetnya.

Penerimaan BM hingga 30 November 2019 adalah sebesar Rp33,59 triliun atau 86,35 persen dari target APBN Tahun 2019. Kinerja penerimaan BM mengalami tekanan sejak awal tahun, dimana pada bulan Mei yang mulai mengalami perlambatan dan masih berlanjut hingga bulan November dengan tumbuh menurun 5,04 persen. Kondisi tersebut sebagai imbas perlemahan kinerja impor nasional yang lebih rendah dibandingkan tahun 2018.

Penerimaan BK sampai dengan akhir bulan November 2019 telah mencapai Rp3,18 triliun atau 71,95 persen dari

target yang diamanatkan. Kinerja ekspor komoditas pertambangan, terutama konsentrat tembaga yang merupakan kontributor terbesar BK, tidak lebih baik dibanding kinerja tahun lalu.

Pelemahan kinerja tersebut sebagai akibat perubahan kebijakan eksplorasi perusahaan tambang utama, dan rendahnya harga komoditas di pasar global. Namun demikian masih terjadi pertumbuhan positif ekspor komoditas terkena BK lainnya, seperti nikel dan bauksit meskipun belum mampu menutupi kinerja BK secara keseluruhan.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Raih Gelar Pejabat Pimpinan Tinggi Terbaik dalam Anugerah ASN 2019

Dwi Teguh Wibowo, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok, raih peringkat pertama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Teladan dalam ajang penghargaan Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Ia memperoleh Piala Adiguna yang diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Tjahjoe Kumolo, pada malam penghargaan ASN yang digelar pada tanggal 02 Desember 2019.

Dwi Teguh memberikan tanggapan atas penghargaan tersebut, “menilai suatu tugas, kedudukan, atau jabatan sebagai suatu amanah, maka kita akan berusaha sebaik mungkin melaksanakannya. Memaksimalkan potensi yang dimiliki dan berusaha memberikan yang terbaik tanpa mengharap sesuatu yang lain. Semua dilakukan ikhlas lillahita’ala dan demi perbaikan institusi agar bermanfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Sejak kepemimpinan Dwi Teguh pada akhir Agustus 2017, kantor Bea Cukai Tanjung Priok, yang merupakan kantor Bea Cukai terbesar di Indonesia, terus menciptakan inovasi, baik dari segi pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan arus lalu lintas barang impor dan ekspor, pengumpulan penerimaan negara yang optimal, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang berhubungan dengan integritas.

Dalam melaksanakan tugasnya, ia bersama 1.200 orang pegawai Bea Cukai Tanjung Priok dihadapkan dengan tantangan melayani 16.000 entitas pengguna jasa yang aktif melakukan transaksi impor dan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari total impor nasional, 70% kegiatan impor dilayani Bea Cukai Tanjung Priok, dan dari sisi penerimaan negara, kantor ini mengemban target bea masuk sebesar Rp19 triliun atau hampir 50% dari target bea masuk nasional.

Menghadapi hal ini, Dwi Teguh

mengusung konsep “Integrated System with Integrity System”, yakni pelayanan yang efisien dilakukan dengan sistem terintegrasi dengan aplikasi dan otomasi, serta penerapan pengawasan yang efektif untuk internal maupun eksternal demi menjaga integritas kedua belah pihak dalam melaksanakan tugasnya. Standar ISO 9001:2015 diterapkan untuk 71 layanan demi menjaga kualitas dan lebih dari 40 sistem aplikasi telah dikembangkan secara mandiri.

Beberapa inovasi unggulan Bea Cukai Tanjung Priok adalah aplikasi sistem layanan informasi mandiri (SLIM) yang merupakan aplikasi penyedia informasi terkait pelayanan yang dapat diakses dengan alamat bcpriok.info. Selain SLIM, terdapat aplikasi sistem informasi dan administrasi pelayanan (SIAP) yang merupakan sistem informasi dan pelayanan yang berperan sebagai induk aplikasi-aplikasi lokal. SIAP juga berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi antar bidang tugas di Bea Cukai Tanjung Priok.

Dalam hal pengawasan, Dwi Teguh dan Bea Cukai Tanjung Priok juga memanfaatkan teknologi untuk membantu tugas para analis pengawasan, seperti aplikasi analisis dan targeting manifest yang membantu memetakan risiko dari manifest secara otomatis, sehingga tenaga analis dapat difokuskan ke kontainer yang lebih berisiko dibanding yang lain. Aplikasi ini juga membantu mempercepat penerbitan produk pengawasan.

Tim khusus di bidang penindakan, seperti customs narcotics team dan customs enforcement team dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan khusus. Hasilnya, pada tahun 2018 Bea Cukai Tanjung Priok melaksanakan 1.169 kali penindakan dengan nilai barang bukti penindakan mencapai Rp934 miliar.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, Bea Cukai Tanjung Priok terus melakukan inovasi dan mengembangkan program yang strategis agar penerimaan negara dapat ditingkatkan dengan signifikan. Salah satu caranya adalah berkolaborasi dengan sembilan belas kantor wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Pajak, khususnya dengan Kantor Wilayah Pajak Jakarta Utara dalam program sinergi reformasi. Hal ini dilaksanakan karena sebagian besar importir di Tanjung Priok merupakan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak yang berada di bawah wilayah kerja Kanwil Pajak Jakarta Utara.

Program sinergi ini dilaksanakan dalam bentuk joint analysis, klarifikasi bersama, joint operation, joint investigation, dan joint collection. Dalam pelaksanaannya, tim joint program dibantu aplikasi mandiri yang merupakan tools analisis data perpajakan dan kepabeanan, yaitu aplikasi quality assurance (QA) yang merupakan aplikasi yang berisi tentang resume profil wajib pajak berstatus importir/eksportir dan indentor, serta penilaian tentang kepatuhan perpajakan dan kepatuhan kepabeanan. Selain itu,

pada tahun 2019 juga dikembangkan aplikasi Antareja yang merupakan kepanjangan dari ANalyzing, TArgeting, and REporting for Joint progrAm. Aplikasi ini berfungsi untuk mengurangi sharing data secara manual dalam proses pelaksanaan joint analysis Bea Cukai dan Ditjen Pajak yang merupakan hasil pengembangan dari aplikasi QA yang dibuat pada tahun 2017. Dari program sinergi ini, Bea Cukai Tanjung Priok berhasil meraih Best Innovation Award Tahun 2018 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Membahas konsep “integrity system” yang telah disebutkan di awal, hal ini memang menjadi fokus utama Dwi Teguh dalam menjalankan tugasnya di Bea Cukai Tanjung Priok. Berbagai program penguatan integritas dilaksanakan seperti penetapan role model, whistle blowing system, upaya preventif dan represif, focus group discussion, CCTV and hidden cam, manajemen SDM, pakta integritas, reward and punishment system, dan optimalisasi peran unit kepatuhan internal.

Program unggulannya ialah “TOLAK, CATAT, dan LAPORKAN”, yaitu tolak pemberian dari pengguna jasa, dokumentasikan dengan mencatat nama, waktu, tempat kejadian, dan bentuk pemberian, dan laporkan melalui web kipriok.com/tcl atau download aplikasi pada tcl.kipriok.com. Program ini dapat diakses

melalui aplikasi Tipstop yang juga dikembangkan secara mandiri. Tujuan utama program ini agar menimbulkan efek jera bagi para oknum yang diduga memberikan gratifikasi atau suap kepada pegawai, ataupun bagi para oknum pegawai yang berniat memeras atau menerima imbalan dari pengguna jasa. Tindak lanjutnya, oknum pegawai atau pengguna jasa tersebut akan diberikan pembinaan dan penandatanganan pakta integritas, dan jika telah melanggar ketentuan dan kode etik tentunya akan langsung diberikan sanksi yang berlaku.

Ke depan, Dwi Teguh berjanji bahwa Bea Cukai Tanjung Priok tidak akan pernah berhenti melakukan perbaikan dan inovasi. Pada tahun 2020, kantor ini akan mulai menerapkan pelayanan terpadu satu pintu yang akan memudahkan pengguna jasa dalam mendapatkan pelayanan. Dengan adanya seluruh inovasi, tekad, dan pengembangan yang terus dilakukan, bukan tidak mungkin bahwa rencana strategis Bea Cukai Tanjung Priok sebagai sister world customs pada 2022 dan world class customs pada 2024 dapat terwujud. Terakhir, Dwi Teguh juga menyebutkan bahwa, “semua capaian yang diraih Bea Cukai Tanjung Priok bukan semata hasil kerja kerasnya saat menjabat, namun merupakan continues improvement dari para pendahulu kantor ini, yang hebat dan membanggakan.”

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Capaian PNBPN tetap Tumbuh ditengah Menurunnya
Kondisi Global

Realisasi
PNBP s.d.
30 November
2019 (dalam
miliar Rupiah)
telah mencapai
95,89 persen
dari Target
APBN

	2019	Realisasi		
	APBN	30 Nov 2019	% thd APBN	Growth y-o-y (%)
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	378.297,86	362.765,0	95,89	3,44
A. Penerimaan SDA	190.754,77	139.145,2	72,94	(9,22)
1. Migas	159.778,31	109.024,8	68,24	(8,65)
a. Minyak Bumi	118.606,71	88.188,2	74,35	(26,11)
b. Gas Alam	41.171,60	20.836,5	50,61	-
2. Non Migas	30.976,46	30.120,4	97,24	(11,20)
a. Pertambangan Minerba	24.960,72	23.739,4	95,11	(15,58)
b. Kehutanan	4.511,54	4.487,9	99,48	5,04
c. Perikanan	625,81	460,4	73,57	21,02
d. Pend. Per. Panas Bumi	878,38	1.432,7	163,10	25,12
B. Pendapatan dari KND	45.589,30	76.650,1	168,13	70,19
C. PNBPN Lainnya	94.069,33	104.962,1	111,58	(1,01)
D. Pendapatan BLU	47.884,45	42.007,8	87,73	(9,41)

Sampai dengan tanggal 30 November 2019, realisasi PNBPN mencapai Rp362,77 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,44 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp350,72 triliun.

Pada penerimaan SDA, penurunan harga komoditas pertambangan seperti rata-rata ICP dan rata-rata Harga Batubara Acuan selama

periode Januari s.d November 2019 berpengaruh terhadap realisasi sampai dengan November 2019 yaitu mencapai Rp139,15 triliun, atau mengalami penurunan 9,22 persen apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp153,27 triliun.

Adapun realisasi penerimaan SDA Migas mencapai Rp109,02 triliun atau 68,24 persen dari target dalam

APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 8,65 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp119,35 triliun. Penurunan penerimaan SDA Migas tersebut antara lain disebabkan lebih rendahnya rata-rata ICP periode Januari sampai dengan November 2019 yaitu US\$61,94 per barel, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata ICP pada periode yang sama tahun 2018 (US\$68,62 per barel).

Selanjutnya, realisasi penerimaan SDA Non Migas hingga bulan November 2019 mencapai Rp30,12 triliun atau 97,24 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 11,20 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp33,92 triliun. Hal tersebut disebabkan rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) Januari s.d. November 2019 sebesar US\$78,95 per ton, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2018 (US\$99,55 per ton). Penurunan pertumbuhan pada penerimaan SDA Non Migas hanya berasal dari pertambangan minerba (akibat penurunan HBA).

Adapun sumber lainnya dari penerimaan kehutanan, perikanan dan pendapatan pertambangan panas bumi menunjukkan kenaikan pertumbuhan. Penerimaan kehutanan naik sebesar 5,04 persen (yoy) yang utamanya berasal dari kenaikan luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH). Adapun penerimaan perikanan naik sebesar 21,02 persen (yoy) yang mayoritas berasal dari penambahan izin perpanjangan kapal. Sedangkan penerimaan pertambangan panas bumi naik sebesar 25,12 persen (yoy) yang berasal dari pemindahbukuan saldo cadangan reimbursement PPN panas bumi dan penyeteroran bagian pemerintah dari PT Geo Dipa Energi (Persero).

Sementara itu, realisasi pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mencapai Rp76,65 triliun, atau mencapai 168,13 persen dari target dalam APBN 2019. Realisasi pendapatan dari KND ini meningkat secara signifikan yaitu 70,19 persen dari realisasi pada periode yang sama di tahun 2018 (Rp45,04 triliun). Peningkatan ini di antaranya disebabkan adanya setoran sisa surplus Bank Indonesia pada bulan

Mei 2019 sebesar Rp30,09 triliun selain setoran dividen BUMN yang terealisasi sampai dengan bulan November 2019 sebesar Rp46,56 triliun.

Realisasi penerimaan PNBP Lainnya mencapai Rp104,96 triliun atau 111,58 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 1,01 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp106,03 triliun. Namun, terdapat pendapatan dari kegiatan hulu migas yang mengalami kenaikan sebesar 212,08 persen (yoy) yang berasal dari realisasi *signature bonus* untuk wilayah kerja *Corridor* sebesar US\$250 juta setara Rp3,51 triliun.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan akhir November 2019 terealisasi sebesar Rp42,00 triliun atau mencapai 87,73 persen dari target APBN tahun 2019, atau turun sebesar 9,41 persen dari periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp46,37 triliun. Penurunan pendapatan BLU disebabkan utamanya dari kinerja BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit akibat kebijakan tidak dikenakan tarif pungutan sampai dengan 31 Desember 2019. Selain itu, penurunan pendapatan BLU juga terjadi pada Kementerian Kesehatan yang dikarenakan masih terdapat kekurangan pembayaran layanan rumah sakit dari BPJS.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Belanja Bantuan Sosial mendukung keberlanjutan momentum pertumbuhan melalui kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical.

Realisasi BPP sampai dengan 30 November 2019 mengalami peningkatan sebesar 5,5 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), yakni realisasinya mencapai Rp717,8 triliun (83,9 persen terhadap pagunya) atau tumbuh 7,7 persen (yoy). Walaupun tidak setinggi peningkatan kinerja belanja K/L, realisasi belanja non K/L sampai dengan 30 November 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 2,9 persen (yoy).

REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2019

Kinerja penyerapan belanja K/L sampai dengan 30 November 2019 (83,9 persen) relatif lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 (78,6 persen), dimana realisasinya tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy). Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi pada jenis Belanja Bantuan Sosial, Belanja Pegawai, dan Belanja Barang dibandingkan periode yang

Realisasi Belanja
Pemerintah
Pusat s.d 30
November 2019
(dalam triliun
Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat	2019	Realisasi		
	APBN	Realisasi s.d. 30 Nov 2019	% thd APBN	% Growth (yoy)
Belanja K/L	855,45	717,84	83,91	7,72
Belanja Non K/L	778,89	575,36	73,87	2,91
Jumlah	1.634,34	1.293,20	79,13	5,52

sama pada tahun sebelumnya, namun terjadi penurunan pada jenis Belanja Modal.

Meskipun realisasi belanja modal sampai dengan 30 November 2019 mengalami penurunan sebesar 6,8 persen (yoy), kinerja belanja modal pada periode tersebut membaik, dimana persentase penyerapan terhadap pagunya (63,1 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 (62,9 persen). Perlambatan pada belanja modal antara lain disebabkan oleh masih terdapatnya permasalahan ganti rugi lahan yang belum terselesaikan, baik di Kementerian PUPR maupun di Kementerian Perhubungan, serta hambatan payung hukum penugasan baru yang terbit di pertengahan tahun 2019 dan penundaan pelaksanaan pekerjaan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Realisasi belanja modal didominasi oleh: (1) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sebagai faktor pendorong investasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan; dan (2) Belanja Modal peralatan dan mesin yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, dan Basarnas.

Sementara itu, realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 87,8 persen menjadi 99,7 persen pada periode sampai dengan 30 November. Peningkatan tersebut, selain disebabkan oleh kenaikan gaji pokok serta pencairan THR dan gaji ke-13, juga disebabkan oleh kenaikan

tunjangan kinerja pada beberapa K/L seiring dengan meningkatnya capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L.

Realisasi belanja barang sampai dengan 30 November 2019 mencapai 78,0 persen terhadap pagu APBN 2019, serta mengalami pertumbuhan 1,4 persen (yoy). Proporsi realisasi belanja barang yang terbesar digunakan untuk pelaksanaan, serta pengawasan Pemilu. Selain itu, untuk operasional fasilitas kesehatan (BLU Rumah Sakit), operasional fasilitas pendidikan (BLU Universitas), serta fasilitas peningkatan kualitas rumah swadaya berupa peningkatan kualitas atau pembangunan baru bagi rumah tidak layak huni yang dimiliki MBR, dan preservasi pemeliharaan rutin jalan oleh Kementerian PUPR.

Peningkatan kinerja belanja K/L paling besar terjadi pada belanja bantuan sosial, dimana realisasinya sampai dengan 30 November 2019 mencapai 108,9 persen terhadap pagu APBN tahun 2019 (terdapat tambahan kebutuhan untuk penanganan tanggap bencana serta mengakomodir kebijakan kenaikan iuran untuk PBI Program JKN). Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 95,0 persen dari pagu APBN tahun 2018. Pertumbuhan realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai 44,1 persen (yoy) ini menunjukkan bentuk komitmen Pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat berpenghasilan rendah sejak awal tahun, yang antara lain

Tabel. Realisasi Belanja K/L per Jenis Belanja s.d. 30 November 2019

Belanja K/L	2019		Realisasi	
	APBN	s.d. 30 Nov 2019	% thd APBN	% Growth (yoy)
Belanja Pegawai	224,41	223,81	99,73	12,06
Belanja Barang	344,64	268,82	78,00	1,40
Belanja Modal	189,34	119,50	63,11	(6,79)
Bantuan Sosial	97,06	105,71	108,91	44,05
Jumlah	855,45	717,84	83,91	7,72

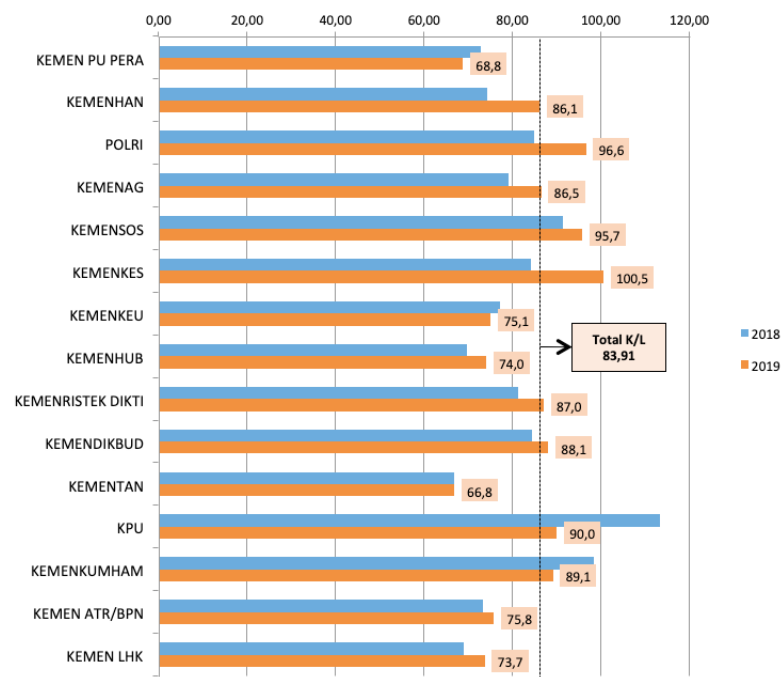
direalisasikan melalui: (i) pencairan selisih atas kenaikan iuran PBI program JKN untuk bulan Agustus sampai dengan Desember sebesar Rp9,1 triliun, (ii) penyaluran PKH telah mencapai Rp32,7 triliun (100 persen terhadap pagu), (iii) penyaluran bantuan pangan telah mencapai Rp15,8 triliun (76,8 persen terhadap pagu), dan (iv) pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana (BNPB) Rp3,0 triliun.

Apabila dilihat berdasarkan K/L-nya, kinerja belanja K/L yang tinggi (83,9 persen terhadap pagu) terutama dipengaruhi oleh 15 K/L dengan pagu terbesar, dimana tingkat penyerapannya sampai dengan 30 November 2019 mencapai 84,7 persen. Sementara itu, 72 K/L lainnya hanya mencapai penyerapan sebesar 79,5 persen pada periode yang sama. Secara umum, capaian kinerja K/L terutama didorong oleh Kementerian Kesehatan yang penyerapannya sampai dengan 30 November 2019 mencapai 100,5 persen terhadap pagunya pada APBN 2019, terutama karena telah melakukan penyaluran bantuan premi bagi PBI JKN tahun 2019 mencapai 99,7 persen. Di samping itu, kinerja Kementerian Sosial juga sangat baik, dimana penyerapannya sebesar 95,7 persen

terhadap pagunya pada APBN 2019, terutama karena telah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga 100 persen (Rp32,7 triliun).

Realisasi output strategis K/L sampai dengan 30 November 2019 juga menunjukkan capaian yang baik walaupun bervariasi. Di bidang pembangunan infrastruktur, Kemen PUPR serta Kemenhub memperlihatkan progres kinerja capaian output strategis yang baik, antara lain pembangunan jalan baru, pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, dan pembangunan rel kereta api. Capaian output strategis di bidang perlindungan sosial oleh Kemensos juga sangat baik, yakni realisasi penyaluran PKH dan bantuan pangan sudah mendekati targetnya. Begitu pula di bidang pembangunan sumber daya manusia, yakni pendidikan (Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenristek Dikti) dan kesehatan (Kemenkes) terdapat banyak capaian output strategis yang sangat baik, meski masih ada pula yang perlu ditingkatkan. Misalnya, capaian output strategis bidang kesehatan berupa kepesertaan penerima PBI JKN dan penugasaan tenaga kesehatan sudah hampir mencapai targetnya. Selanjutnya, output strategis bidang pendidikan

Grafik. Tingkat Penyerapan pada 15 K/L dengan Pagu Terbesar s.d. 30 November 2019 (dalam persen)



sebagian besar sudah menunjukkan capaian yang mendekati target juga, antara lain output sertifikasi guru, tunjangan profesi dosen, penyaluran BOS, beasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar (PIP), serta beasiswa ADIK. Sementara itu, di bidang pertahanan dan keamanan, yang dilaksanakan oleh Kemenhan dan POLRI, kinerja untuk mencapai target output strategis masih perlu ditingkatkan.

B. REALISASI BELANJA NON K/L TAHUN 2019

Realisasi belanja non-K/L sampai dengan 30 November 2019 mencapai Rp575,4 triliun atau menyerap 73,9 persen terhadap pagu APBN 2019. Meskipun secara nominal realisasi belanja non K/L tumbuh positif

sebesar 2,92 persen (yoy), penyerapan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018 (92,1 persen dari pagu APBN tahun 2018). Hal ini dikarenakan, antara lain terjadi peningkatan pada realisasi pembayaran bunga utang dan belanja hibah, di sisi lainnya terjadi penurunan realisasi belanja subsidi.

Realisasi pembayaran bunga utang sampai dengan 30 November 2019 mencapai Rp267,6 triliun atau sebesar 97,0 persen terhadap APBN 2019. Secara nominal, realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 (Rp251,1 triliun), meskipun persentase penyerapannya lebih rendah (105,2 persen terhadap APBN 2018).

Sementara itu, realisasi belanja

Tabel Capaian Beberapa Output Strategis K/L s.d. 30 November 2019

	INDIKATOR	TARGET	REAL S.D. JUNI
KEMENPUPERA	Pembangunan jalan baru (km)	480,1	254,5
	Pembangunan jalan tol (km)	21,3	18,4
	Pembangunan jembatan (m)	18.580,96	12.577,45
KEMENHUB	Pembangunan bandara	4	0
	Pembangunan rel KA (km 'sp)	534,6	240,41
KEMENSOS	Penyaluran PKH (KPM)	10,0 juta	9,8 juta
	Bantuan pangan	15,6 juta	15,3 juta
KEMENHAN	Peningkatan/Pengadaan/Penggantian Alutsista, a.l:		
	Alpung, Kri, Kal dan Ranpur/Rantis Matra Laut	29	3
	MKK (unit)	235.717	55.000
POLRI	Proses Pengadaan, a.l.:	17,9 juta	10,4 juta
	Almatsus (unit)	140.512	79.529
	Rumdin Personil (unit/KK)	92.813	53.334
KEMENDIKBUD	Program Indonesia Pintar (juta siswa)	17,9	15,1
	Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah (ribu unit)	14,9	13,7
	TPG Non PNS (ribu orang)	247,8	201,8
	Sertifikasi Guru (ribu orang)	40,0	40,4
KEMENAG	Pendidikan Kecakapan Kerja (ribu orang)	80,0	57,6
	Penyaluran KIP (siswa)	2,2 juta	1,4 juta
	Penyaluran BOS (siswa)	8,9 juta	8,4 juta
	Penyaluran Bidik Misi (mahasiswa)	32,6 ribu	27,1 ribu
	TPG Non PNS (ribu orang)	283,0	219,6
	Beasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah (ribu mahasiswa)	431,0	411,0
KEMRISTEKDIKTI	Beasiswa ADIK (mahasiswa)	7.148	5.224
	Tunjangan Profesi Dosen (dosen)	133.417	133.417
KEMENKES	Peserta Penerima PBI JKN (juta jiwa)	96,8	96,7
	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Kekurangan (ribu)	2.008,4	146,2
	Layanan Pengendalian Penyakit TB (layanan)	809	701
	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (paket)	23	16
	Penguasaan Tenaga Kesehatan (orang)	4.450	4.146

subsidi sampai dengan 30 November 2019 mencapai Rp177,7 triliun atau 79,2 persen dari pagu APBN tahun 2019, lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp182,7 triliun atau 116,9 persen dari pagu 2018). Adapun faktor yang mempengaruhi, antara lain adalah rendahnya ICP sehingga subsidi energi tumbuh negatif sebesar 5,3 persen (yoy). Namun, subsidi

non-energi mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,5 persen (yoy), khususnya disumbang oleh subsidi pupuk yang tumbuh 10,7 persen (yoy) seiring dengan perbaikan administrasi pencairan.

Selanjutnya realisasi belanja hibah sampai dengan 30 November 2019 mencapai Rp2,4 triliun atau 122,2 persen terhadap pagu APBN 2019,

Tabel. Realisasi
Belanja Non K/L
s.d. 30 November
2019

Belanja Non K/L	2019		Realisasi	
	APBN	s.d. 30 Nov 2019	% thd APBN	% Growth (yoy)
a.l Pembayaran Bunga Utang	275,89	267,63	97,01	6,58
Subsidi	224,32	177,69	79,21	(2,74)
Belanja Hibah	1,94	2,37	122,24	2.305,98
Jumlah	778,89	575,36	73,87	2,91

jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp0,1 triliun atau 6,7 persen dari pagu APBN tahun 2018. Pertumbuhan realisasi yang cukup tinggi pada periode ini antara

lain disebabkan adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (realokasi dari pos belanja non-K/L lainnya) dalam bentuk belanja hibah ke Pemerintah Daerah.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

“Bantu Daerah Bayar Kenaikan Iuran JKN bagi PBI, Pemerintah Salurkan DAU Tambahan Rp3 Triliun Lebih”

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga 30 November 2019 adalah sebesar Rp752,85 triliun atau 91,06 persen dari pagu alokasi. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 4,99 persen (yoy).

A. DANA PERIMBANGAN

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan akhir November 2019 telah terealisasi sebesar Rp75,29 triliun atau 70,80 persen dari pagu alokasi, tumbuh negatif sebesar 2,00 persen (yoy). Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan penundaan penyaluran DBH Triwulan IV TA 2019, yang rencananya akan digunakan untuk menyelesaikan Kurang Bayar DBH pada bulan Desember 2019.

Per 30 November 2019, Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp420,77 triliun atau 100,69 persen dari pagu alokasi, menunjukkan peningkatan sebesar 4,87 persen (yoy). Realisasi penyaluran yang melebihi angka 100 persen tersebut disebabkan adanya kebijakan penyaluran DAU Tambahan untuk pembayaran kenaikan iuran PBI BPJS yang didaftarkan oleh Daerah sebesar Rp3,34 triliun. Selain itu, angka realisasi di atas juga sudah memperhitungkan realisasi penyaluran DAU Tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan sebesar Rp2,61 triliun.

Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi penyaluran DAU di November, antara lain: (i) penyaluran kembali DAU reguler terhadap 16 Pemerintah

Daerah yang telah menyampaikan laporan Informasi Keuangan Daerah (IKD) sebesar Rp156,61 miliar; (ii) penyaluran kembali DAU reguler terhadap 25 Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian sebesar Rp108,97 miliar; (iii) penyelesaian kewajiban Daerah Induk kepada Daerah Otonom Baru (DOB) pada 3 Pemerintah Daerah sebesar Rp5,00 miliar; dan (iv) penyaluran kembali DAU reguler untuk 5 Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan komitmen pemenuhan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp48,65 miliar.

DAU Tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan yang telah terealisasi sebesar Rp2,61 triliun atau 87,06 persen dari pagu alokasi. Realisasi ini terdiri dari penyaluran DAU Tambahan Tahap I kepada 403 Pemerintah Daerah sebesar Rp1,46 triliun (97,42 persen dari pagu tahap I) dan Tahap II kepada 324 Pemerintah Daerah sebesar Rp1,15 triliun (76,70 persen dari pagu tahap II).

Di sisi lain, realisasi DAU Tambahan untuk pembayaran kenaikan iuran PBI BPJS sebesar Rp3,34 triliun dari total pagu Rp3,5 triliun, menyisakan Rp0,16 triliun yang merupakan dana cadangan untuk perubahan jumlah kepesertaan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 166 tahun 2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Hingga 30 November 2019, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah terealisasi sebesar Rp47,90 triliun atau 69,09 persen dari pagu alokasi. Jika dilihat dari daftar kontrak kegiatan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat optimis penyaluran DAK Fisik akan optimal di sisa tahun ini. Untuk itu, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis terkait untuk mendorong Pemerintah Daerah agar segera menyampaikan persyaratan penyaluran tahap III sampai dengan batas akhir waktu penyampaian 16 Desember 2019. Persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap III tersebut antara lain: (i) laporan realisasi penyerapan dana minimal 90 persen dan capaian *output* minimal 70 persen yang telah direviu oleh inspektorat daerah, serta (ii) laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian *output* 100 persen.

Realisasi penyaluran DAK Nonfisik sampai dengan 30 November 2019 adalah sebesar Rp118,63 triliun atau 90,53 persen dari pagu alokasi. Jumlah ini menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 6,28 persen (yoy). Beberapa hal yang mempengaruhi adalah kepatuhan daerah yang semakin baik dalam penyampaian laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) menjadi salah satu penentu capaian positif tersebut. Selain itu, koordinasi yang

terus dilakukan dengan seluruh Kementerian/Lembaga teknis terkait untuk mendorong penyerapan di daerah melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan kegiatan lainnya juga ikut mendukung kenaikan realisasi penyaluran DAK Nonfisik.

B. DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Hingga akhir November 2019, penyaluran DID telah terealisasi sebesar Rp9,68 triliun atau 96,84 persen dari pagu alokasi, menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 19,98 persen (yoy).

Dari total 336 Pemerintah Daerah penerima penyaluran tahap I, 13 diantaranya adalah Pemerintah Daerah penerima DID yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk penyaluran Tahap II, terdapat 301 Pemerintah Daerah yang telah menerima dengan total nominal sebesar Rp4,42 triliun.

C. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Dana Otonomi Khusus (Otsus) per 30 November 2019 telah disalurkan sebesar Rp15,73 triliun atau 75,00

persen dari pagu alokasi. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4,59 persen (yoy). Sampai dengan akhir November 2019, proses penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur tahap III masih terus berjalan. Untuk mengakselerasi proses tersebut, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri terus mendorong daerah untuk segera menyampaikan dan melengkapi persyaratan penyalurannya.

Untuk Dana Keistimewaan Provinsi D.I. Yogyakarta, sampai dengan 30 November 2019, penyaluran dana telah dilakukan sepenuhnya sesuai pagu alokasi yakni sebesar Rp1,20 triliun.

D. DANA DESA

Hingga akhir November 2019, penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD telah terealisasi sebanyak Rp63,63 triliun atau 90,90 persen dari pagu alokasi. Jumlah ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 16,91 persen (yoy). Meskipun demikian, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong daerah untuk segera memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Tanggal : 1 Januari s.d. 30 November 2019

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2018		2019		% thd APBN
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766.162,58	717.069,49	826.772,53	752.846,88	91,06
Transfer ke Daerah	706.162,58	662.641,46	756.772,53	689.213,95	91,07
A. Dana Perimbangan	676.602,99	638.525,15	724.592,59	662.594,61	91,44
1. Dana Transfer Umum	490.714,92	478.086,01	524.223,75	496.067,42	94,63
a. Dana Bagi Hasil	89.225,34	76.836,60	106.350,16	75.294,33	70,80
b. Dana Alokasi Umum	401.489,58	401.249,41	417.873,58	420.773,09	100,69
2. Dana Transfer Khusus	185.888,07	160.439,14	200.368,84	166.527,19	83,11
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	62.436,26	48.822,30	69.326,70	47.897,67	69,09
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	123.451,81	111.616,84	131.042,14	118.629,52	90,53
B. Dana Insentif Daerah	8.500,00	8.071,63	10.000,00	9.684,38	96,84
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	21.059,58	16.044,69	22.179,94	16.934,96	76,35
1. Dana Otsus	20.059,58	15.044,69	20.979,94	15.734,96	75,00
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	8.029,79	6.022,34	8.357,47	6.268,10	75,00
b. Provinsi Aceh	8.029,79	6.022,34	8.357,47		75,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.000,00	3.000,00	4.265,00	3.198,75	75,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Dana Desa	60.000,00	54.428,03	70.000,00	63.632,93	90,90

DAU Tambahan untuk Keberlangsungan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pemerintah sangat peduli terhadap kemajuan pembangunan di daerah. Berbagai bentuk dukungan diberikan kepada daerah agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, salah satunya melalui penyaluran Dana Transfer Umum (DTU). Secara prinsip, DTU sebenarnya bersifat “block grant”, yang artinya Pemerintah Pusat memberikan sejumlah dana kepada Pemerintah Daerah yang dapat digunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah masing-masing. Namun, demi menjaga efektivitas DTU, yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), penggunaan DTU diarahkan paling sedikit 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang terkait langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan

publik dan ekonomi. Infrastruktur pendukung ekonomi di daerah perlu segera dibangun agar geliat perekonomian dapat semakin hidup, lapangan kerja semakin terbuka, dan tingkat kemiskinan di daerah tersebut semakin berkurang. Pembangunan fasilitas layanan publik juga tak kalah penting agar setiap daerah di Indonesia dapat menyediakan layanan publik yang cepat, murah, dan terstandarisasi kepada masyarakatnya.

Penyaluran DAU juga ditujukan untuk mendukung sektor kesehatan

masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, terdapat kenaikan iuran bagi para peserta BPJS, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari daerah. Orang-orang yang masuk dalam kategori PBI tersebut adalah kalangan penduduk berpenghasilan rendah yang didaftarkan kepesertaannya dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah melalui dana APBD. Pemerintah memahami kesulitan Pemerintah Daerah apabila harus menyediakan dana terkait dengan penyesuaian iuran

dimaksud dalam APBD yang sedang berjalan, apalagi saat ini sudah memasuki triwulan akhir di tahun 2019. Untuk itu, selisih perubahan iuran untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2019 yang seharusnya menjadi beban Pemerintah Daerah dialihkan menjadi beban Pemerintah Pusat melalui pengalokasian DAU Tambahan yang diatur dalam PMK Nomor 166/PMK.07/2019 tentang DAU Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. DAU Tambahan yang dialokasikan sebesar Rp3,50 triliun tersebut merupakan wujud keberpihakan dan dukungan pemerintah agar masyarakat yang kurang mampu dapat tetap menerima pelayanan jaminan kesehatan yang memadai di seluruh daerah di Indonesia.





Foto Ilustrasi:
Media Keuangan/ DJPPR

PEMBIAYAAN UTANG

“Pembiayaan yang pruden dan akuntabel untuk menjaga kredibilitas fiskal di tengah volatilitas global”

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir November 2019 mencapai Rp442.923,6 triliun atau 123,29 persen target APBN yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp465.101,9 triliun atau 119,58 persen target APBN dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp22.178,2 triliun atau 74,66 persen target APBN.

Pembiayaan dalam bentuk SBN realisasinya melampaui target yang ditetapkan oleh APBN 2019 untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang melebar sebagai dampak dari kondisi perlambatan ekonomi global ke ekonomi domestik. Meskipun begitu, hal tersebut dilakukan dengan secara pruden dan akuntabel dengan memperhitungkan semua biaya dan risiko yang akan dihadapi. Kondisi ekonomi dunia yang tidak kondusif selama tahun 2018-2019 berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Agar ekonomi tetap bergerak di Indonesia, Pemerintah menaikkan porsi pembiayaan untuk membantu menggerakkan perekonomian melalui kenaikan belanja produktif Pemerintah atau yang umum disebut

kebijakan “countercyclical.” Pelebaran defisit APBN yang diperkirakan di kisaran 2 persen hingga 2,2 persen terhadap PDB perlu dilakukan karena APBN menjalankan fungsi stabilisasi saat perekonomian mengalami perlambatan.

Sementara itu, realisasi pinjaman secara neto untuk November 2019 mengalami negatif karena lebih besarnya pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri dan luar negeri dibandingkan dengan penarikan pinjamannya. Cicilan pokok pinjaman dalam negeri yang telah dibayarkan Pemerintah hingga akhir November telah terealisasi sebesar Rp1,00 triliun atau masih sama jumlahnya jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, atau mencapai 67,88 persen dari target APBN. Sedangkan cicilan pokok pinjaman luar negeri telah dibayarkan sebesar Rp75,22 triliun atau telah mencapai 83,14 persen target APBN.

Lebih jauh, realisasi pinjaman dalam negeri secara neto telah mencapai Rp670,4 miliar atau lebih tinggi dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN 2019 sebesar Rp482,4 miliar. Realisasi

PEMBIAYAAN UTANG

OKTOBER 2019

REALISASI PEMBIAYAAN UTANG

hingga akhir Oktober 2019

Mencapai:

Rp442,92 triliun

Realisasi Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

123,29%

Realisasi Pembiayaan Utang 31 November **123,29%**



APBN Target APBN 2019 **100%**

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir November 2019 mencapai Rp482.4 triliun atau 107,03 persen target APBN yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp401,71 triliun atau 103,28 persen target APBN dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp17,19 triliun atau 57,88 persen target APBN.

Realisasi dari APBN Sumber Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

Surat Berharga Negara (Neto) November 2019 **119,58%**



APBN Target APBN **100%**

Pinjaman (Neto) 31 Oktober 2019 **74,66%**



APBN Target APBN **100%**

Akumulasi pinjaman yang terdiri atas pinjaman secara total mencapai angka negatif, seperti yang terjadi pada bulan-bulan sebelumnya, karena realisasi pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri yang lebih besar dari pada penarikan Pinjaman Luar Negeri. Namun sebaliknya untuk Pinjaman Dalam Negeri, penarikan pinjaman lebih besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok.

Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)

Rp1.670,9 **85,41%**

APBN
Rp1.956,4

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN

Rp(1.000,5) **67,88%**

APBN
Rp(1.473,9)

Pinjaman Luar Negeri (Neto)

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

Rp52.372,4 **86,88%**

APBN
Rp60.280,5

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN

Rp(75.221,0) **83,14%**

APBN
Rp(90.470,2)

DIVERSIFIKASI PEMBIAYAAN UNTUK MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN

Posisi Utang Per November 2019

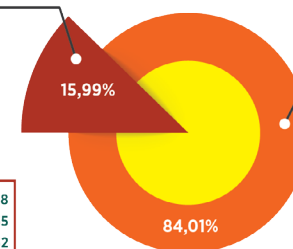
Rp4.814,31 triliun

Pinjaman
Rp770,04

• Pinjaman Dalam Negeri
Rp8,09

• Pinjaman Luar Negeri
Rp761,95

• Bilateral	300,88
• Multilateral	422,55
• Commercial Banks	38,52
• Suppliers	-



Surat Berharga Negara
Rp4.044,27

• Domestik
Rp2.978,74

• Surat Utang Negara	2.446,47
• Surat Berharga Syariah Negara	532,27

• Valas
Rp 1.065,53

• Surat Utang Negara	851,18
• Surat Berharga Syariah Negara	214,35



Debt to GDP : 30,03%

ini berbeda dari realisasi pinjaman luar negeri yang secara neto masih di bawah jumlah yang ditetapkan dalam APBN 2019. Pinjaman dalam negeri sebagian besar digunakan untuk perbaikan infrastruktur pertahanan negara. Pinjaman dalam negeri ini lebih diutamakan dibandingkan dengan pinjaman luar negeri, karena selain untuk menghindari risiko kurs akibat fluktuasi mata uang, pinjaman dalam negeri tidak mengikat seperti pinjaman luar negeri. Hal tersebut mencerminkan Pemerintah tetap memegang komitmen dan prinsip kehati-hatian dalam pengadaan pembiayaan.

Bauran kebijakan countercyclical melalui pengadaan pembiayaan sejauh ini dinilai berhasil mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia

hingga triwulan III tahun 2019 tetap di atas 5 persen meskipun terjadi berbagai gejolak ekonomi yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi secara global. Fundamental yang kuat dan pengelolaan fiskal yang kredibel memperkuat optimisme kedepan menuju Indonesia Maju..

Posisi Utang

Posisi utang Pemerintah per akhir November 2019 berada di angka Rp4.814,31 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 30,03 persen. Meskipun rasio ini sedikit meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya, hal ini masih dapat ditoleransi karena masih berada jauh di bawah batas aman seperti yang ditentukan Undang-Undang



Keuangan Negara yaitu 60 persen terhadap PDB. Melalui penetapan batas maksimum yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, Pemerintah benar-benar pruden dalam menentukan besaran utang yang akan dibuat dan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan APBN serta sesuai kondisi pasar. Pada saat situasi pasar untuk penerbitan utang dalam kondisi kondusif, sementara Pemerintah membutuhkan dana untuk menutup defisit APBN yang terjadi karena pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia dan lainnya, maka utang akan diterbitkan dengan batas maksimum yang telah ditentukan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang tersebut.

Untuk periode November 2019, total pinjaman Pemerintah mencapai Rp770,04 miliar. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan total pinjaman Pemerintah periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp784,38 miliar.

Sementara itu, Surat Utang Negara Domestik dalam mata uang rupiah per November 2019 mencapai Rp2.446,47 miliar dan Surat Berharga Negara Syariah Domestik mencapai Rp532,27 miliar. Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode yang sama tahun 2018. Peningkatan tersebut terjadi karena Pemerintah melakukan strategi oportunistik yaitu penerbitan utang dilakukan pada saat kondisi pasar keuangan yang kondusif, antara lain ketika suku bunga sedang turun. Kondisi ini membuat biaya penerbitan serta imbal hasil SBN cukup rendah.

Selain memiliki imbal hasil yang cukup rendah, SBN juga memberi manfaat yang sangat besar. Salah satunya adalah manfaat dari Surat Berharga Syariah Negara, atau dikenal dengan Sukuk Negara. Sebagai wujud nyata kontribusi Sukuk Negara dalam pembangunan negara adalah terwujudnya Jembatan Youtefa di Teluk Youtefa, Provinsi Papua yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir bulan Oktober 2019. Jembatan Youtefa dibiayai dari dana

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara sebesar Rp1,3 triliun dan dilengkapi dengan kontribusi dana APBD Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kota Jayapura sebesar Rp500 miliar. Pembiayaan dari SBSN tersebut dilaksanakan dengan skema Multi Years Contract (MYC) mulai Tahun Anggaran (TA) 2015 s.d TA 2019. Jembatan ini menghubungkan Holtekamp dengan Hamadi dengan panjang rentang jembatan 1332 meter (732 meter jembatan dan 600 meter pile slab), serta jalan akses jembatan sepanjang 9950 meter, dengan lebar jalan 16 meter. Jembatan yang memiliki Tipe Jembatan Utama Pelengkung (Continuous Steel Arch Bridge) dan Pondasi Jembatan Utama Bored Pile ini dapat mempersingkat waktu tempuh dari Kota Jayapura ke perbatasan Skouw (perbatasan dengan Papua Nugini) dari 2,5 jam menjadi 1 jam. Hal tersebut dapat mendukung peningkatan mobilitas sumber daya ekonomi. Selain menjadi sarana perhubungan yang memberikan keuntungan logistik, jembatan ini juga dijadikan obyek wisata oleh warga sekitar.

Pembiayaan APBN dewasa ini mengalami peningkatan, karena APBN dalam kondisi ekonomi dunia sekarang salah satunya berfungsi sebagai alat stabilisasi, yaitu menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Oleh karena itu, utang sebagai sumber pembiayaan APBN merupakan alat, dan bukan merupakan tujuan. Dengan kata lain, Pemerintah tidak dengan sengaja menciptakan utang yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang dan alasan yang membawa manfaat. Akan tetapi, Pemerintah menggunakan utang untuk membantu dalam mencapai tujuan pembangunan, seperti pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi

Green Sukuk Ritel, Wujud Kepedulian Pembiayaan Terhadap Pelestarian Lingkungan

Pada tanggal 1-21 November 2019, Pemerintah telah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi di Sukuk Tabungan seri ST006. Menawarkan imbalan sebesar 6,75% p.a (*floating with floor*), ST006 berhasil mengumpulkan total nominal pembelian sebesar Rp1,46 Triliun dengan jumlah investor sebanyak 7.735 orang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Yang menarik, partisipasi generasi millennial pada ST006 sangat tinggi, yaitu sekitar 51% (3.950 orang).

Sukuk Tabungan merupakan produk investasi syariah terkini yang ditawarkan oleh Pemerintah, memiliki jangka waktu dua tahun, tidak dapat diperjualbelikan, dan telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Sejak tahun 2018, Sukuk Tabungan dapat dibeli secara online melalui platform elektronik Mitra Distribusi yang ditunjuk Pemerintah.

Berbeda dari penerbitan Sukuk Tabungan seri sebelumnya, ST006 diterbitkan dengan format hijau (Green Sukuk Ritel) dimana seluruh hasil penerbitan digunakan untuk membiayai (new financing dan refinancing) proyek-proyek ramah lingkungan. Proyek-proyek hijau yang dibiayai dari penerbitan ST006 merupakan proyek yang ada di Kementerian Perhubungan (seperti layanan bandar udara, kenavigasian, dan pelabuhan) dan Kementerian PUPR (seperti embung, jaringan irigasi, dan unit air baku).

Sebagai Green Sukuk Ritel pertama, ST006 merupakan wujud komitmen

dan kontribusi Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan Syariah sekaligus mengatasi perubahan iklim. Green Sukuk Ritel ini merupakan kelanjutan inisiatif Global Green Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah di pasar internasional pada tahun 2018 dan 2019 yang telah mendapatkan banyak apresiasi dan penghargaan dari dunia internasional.

Tahukah anda, investasi di Sukuk Tabungan maupun di Surat Berharga Negara (SBN) Ritel lainnya sangat mudah, karena bisa dilakukan secara online sehingga bisa dibeli kapanpun dan dimanapun selama masa penawaran. Dengan minimum pembelian hanya Rp1 juta, setiap individu WNI yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk bisa memiliki produk investasi yang sangat menguntungkan

ini dan tentunya sangat aman karena dijamin 100% oleh Pemerintah.

Cinta dan bela negara tidak hanya ditunjukkan dengan berjuang melawan penjajah, tetapi juga bisa ditunjukkan dengan membeli Sukuk Tabungan. Karena dengan berinvestasi pada SBN Ritel kita bisa turut berkontribusi dalam membangun Indonesia. Terlebih, dengan tema "Green" yang diusung, kita dapat menjadi penyokong kelanjutan lingkungan Indonesia yang lebih baik yang kelak akan diwariskan pada generasi selanjutnya.

Realisasi APBN s.d. 30 November 2018 dan 2019

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	2018			2019		
	APBN	Realisasi s.d. 30 Nov	% thd APBN	APBN	Realisasi s.d. 30 Nov	% thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.894,72	1.662,92	87,77	2.165,11	1.677,11	77,46
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.893,52	1.652,23	87,26	2.164,68	1.675,16	77,39
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.618,10	1.301,52	80,43	1.786,38	1.312,40	73,47
a. Pajak Dalam Negeri	1.579,40	1.259,97	79,78	1.743,06	1.275,62	73,18
b. Pajak Perdagangan Internasional	38,70	41,55	107,36	43,32	36,77	84,89
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	275,43	350,72	127,33	378,30	362,77	95,89
II. HIBAH	1,20	10,69	890,73	0,44	1,95	447,25
B. BELANJA NEGARA	2.220,66	1.942,61	87,48	2.461,11	2.046,05	83,14
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.454,49	1.225,54	84,26	1.634,34	1.293,20	79,13
1. Belanja K/L	847,44	666,39	78,64	855,45	717,84	83,91
2. Belanja Non /L	607,06	559,15	92,11	778,89	575,36	73,87
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766,16	717,07	93,59	826,77	752,85	91,06
1. Transfer ke Daerah	706,16	662,64	93,84	756,77	689,21	91,07
2. Dana Desa	60,00	54,43	90,71	70,00	63,63	90,90
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(87,33)	(28,58)	32,72	(20,11)	(101,31)	503,79
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(325,94)	(279,69)		(296,00)	(368,94)	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2,19)	(1,89)		(1,84)	(2,30)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	325,94	347,94	106,75	296,00	421,03	142,24
al. PEMBIAYAAN UTANG	399,22	363,69	91,10	359,25	442,92	123,29
KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN		68,25			52,09	

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

